AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT YANG TIDAK MEMILIKI PENETAPAN PENGADILAN PADA PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA ADAT PEKUTATAN, JEMBRANA

Putu Chika Ananda Putri
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: chiandaputri@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the legal status and legal consequences of adopted children who do not have a court determination in inheritance matters under customary law in the Pekutatan Customary Village, Jembrana. The method used is empirical legal research with a sociological approach, employing interviews, observation, and documentation studies. The results of the research indicate that under customary law, adopted children who have undergone the meperas ceremony are recognized as legitimate members of the family and are entitled to inheritance rights. However, under national law, the absence of a court determination results in weak legal certainty regarding the status and inheritance rights of adopted children. This condition gives rise to legal dualism between customary law and positive law, which has the potential to trigger conflicts. Therefore, harmonization between the two legal systems is necessary to ensure legal certainty and justice for adopted children.

Keywords: **Adopted Children, Customary Law, Inheritance, Court Determination**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta akibat hukum terhadap anak angkat yang tidak memiliki penetapan pengadilan dalam pewarisan menurut hukum adat di Desa Adat Pekutatan, Jembrana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara adat, anak angkat yang telah melalui upacara meperas diakui sah sebagai bagian keluarga dan berhak atas warisan. Namun, dalam hukum nasional, ketiadaan penetapan pengadilan menyebabkan lemahnya kepastian hukum terhadap status dan hak waris anak angkat. Kondisi ini menimbulkan dualisme hukum antara hukum adat dan hukum positif yang berpotensi memicu konflik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kedua sistem hukum guna menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi anak angkat.

Kata kunci: **Anak Angkat, Hukum Adat, Pewarisan, Penetapan Pengadilan**